



Term of Reference

International Webinar-Indonesia Journalist Reports

Transisi Energi: Deforestasi, Ekspor Illegal, Hak-Hak Masyarakat Adat, Praktik Culas, dan Gangguan Lingkungan

Latar Belakang

Transisi energi menjadi upaya prioritas dalam merespons krisis iklim global. Di Indonesia, salah satu strategi pemerintah untuk mengatasi krisis iklim, yakni dengan meningkatkan bauran energi terbarukan dengan memanfaatkan biomassa kayu sebagai bioenergi. Biomassa kayu akan menggantikan hingga 10% batubara di 52 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Ditaksir setidaknya butuh 8 hingga 14 juta ton *wood pellet* per tahunnya. Kementerian Kehutanan merespon dengan membangun proyek Hutan Tanaman Energi yang telah dibagi ke 31 konsesi di Indonesia dengan total luas 1,3 juta hektare. Sektor kehutanan bakal menjadi bancakan proyek bioenergi kedepan apalagi setelah pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni siap menyediakan tanah seluas 20 juta hektare untuk proyek swasembada pangan, energi, dan air yang berasal dari kawasan hutan negara.

Forest Watch Indonesia (FWI) bekerjasama dengan Mongabay Indonesia dan Jaringan Jurnalis Transisi Energi Watch (TEW) turut mengawal implementasi proyek bioenergi sepanjang tahun 2024 lalu, untuk memastikan transparansi dan partisipasi dalam mewujudkan transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Setidaknya 31 jurnalis yang tersebar di Provinsi Aceh, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Maluku Utara turun ke lapangan untuk melakukan liputan investigasi mengungkap fakta-fakta yang selama ini tidak dilaporkan ke publik.

Di Jambi, PT Hijau Artha Nusa (HAN) melakukan deforestasi hampir 4 ribu hektare tapi hanya menanam 64,5 hektare. Konsesinya dikuasai pembalok liar, kebun sawit, dan tambang ilegal. Kini PT HAN bangkrut dan meninggalkan dampak berupa kerusakan lingkungan serta janji kemitraan yang tak ditepati. Sementara itu, PT Rimba Palma Sejahtera Lestari (RPSL) pelaku industri biomassa di Jambi diduga memakai kayu ilegal dari kawasan konservasi untuk ekspor pelet kayu ke Korea Selatan, tanpa tercatat di sistem resmi. Kedua kasus ini menimbulkan kerugian negara besar dan memperparah deforestasi serta krisis iklim.

Di Aceh, PT Aceh Nusa Indrapuri (ANI) masuk pada daftar pencabutan izin oleh KLHK. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum transisi energi di tapak. Sementara itu, praktik *co-firing* di PLTU 1&2 Nagan Raya Aceh menimbulkan dampak serius bagi warga. Asap putih kekuningan dan debu mencemari pemukiman. Meski warga telah direlokasi, dampak *co-firing* menyebabkan

anak-anak menderita ISPA, batuk kronis, dan sesak napas. Teknologi penyaring emisi yang diklaim tersedia dinilai tidak efektif.

Di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, Sebanyak 12 perusahaan PBPH-HT akan kelola 505 ribu hektare hutan untuk bioenergi, padahal wilayah ini jadi target pengurangan deforestasi FoLU Net Sink 2030. Di Kalbar PLTBm yang dimiliki PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL) memanfaatkan kayu lokal untuk hasilkan listrik 15 MW, tapi permintaan yang tinggi picu risiko deforestasi dan konflik agraria. Pasokan biomassa untuk PLTU Teluk Balikpapan Kaltim juga terkendala kapasitas mesin, harga beli rendah, dan minimnya dukungan pemerintah daerah. Kebijakan biomassa yang *top-down* tanpa tata kelola inklusif berisiko timbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial.

Sementara di Gorontalo, dua perusahaan sawit yang izinnya diputihkan justru melakukan deforestasi untuk memenuhi kebutuhan produksi ekspor *wood pellet* ke Korea dan Jepang. Mereka memanfaatkan celah hukum untuk mendapat surat keputusan hutan hak dari Kementerian Kehutanan. Kedua perusahaan tergabung dalam Biomassa Jaya Abadi Group yang diduga melakukan ekspor ilegal dan merusak areal bernilai konservasi tinggi. Praktik ini merugikan negara, menghilangkan hak masyarakat, dan menunjukkan sisi gelap transisi energi yang justru jadi bentuk baru kolonialisme.

Di Jawa, kebun energi seluas 18.605 hektare milik Perhutani sejak 2020 belum dimanfaatkan PLTU, padahal ditargetkan panen 2022. PLN EPI justru memakai limbah, bukan dari kebun Perhutani. Proyek bioenergi mangkrak karena masalah keekonomian, tak adanya industri pengolahan, dan sistem hasil hutan yang rumit. Sementara itu, di PLTU Pelabuhan Ratu dan Indramayu, praktik curang pembakaran biomassa yang dibasahi menyebabkan polusi dan kerugian negara lebih dari Rp1 miliar per bulan, tapi tetap dibiarkan.

Di Halmahera, Maluku Utara proyek bioenergi dijalankan oleh PT Kirana Cakrawala (KC) yang dilakukan tanpa prinsip PADIATAPA. Diketahui konsesi KC menguasai wilayah Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa yang sudah turun temurun tinggal di hutan Halmahera. Dari sejak awal Masyarakat Adat tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan dan penentuan lokasi proyek bioenergi. Masyarakat Adat kini terancam dieksklusi akibat operasionalisasi KC.

Di Pulau Buru, Maluku proyek bioenergi dilakukan oleh PT Inagro Cipta Nusantara (ICN), anak usaha dari PT Perhutani Alam Lestari (PAL) yang berada dalam naungan BUMN. ICN didanai oleh Danareksa untuk menanam tanaman gamal di Pulau Buru. ICN mengantongi izin konsesi seluas 19.000 hektare di wilayah hutan adat tanpa melibatkan warga dalam proses perizinan. Lahan pertanian masyarakat menjadi terancam tergusur. Perempuan adat menjadi kelompok paling terdampak karena hilangnya kebun untuk berladang. Tanpa PADIATAPA masyarakat tidak memahami sepenuhnya konsekuensi proyek. Situasi ini memperlihatkan pemaksaan dan dominasi negara melalui BUMN yang memperbesar konflik agraria dan kekerasan struktural.

Menimbang berbagai temuan tersebut, FWI, Mongabay Indonesia dan TEW menilai bahwa transparansi tata kelola hutan dan lahan adalah kunci dalam menyikapi ketimpangan informasi dan mencegah terulangnya praktik-praktik curang yang merusak hutan atas nama transisi energi. Dalam konteks ini, peran media menjadi sangat penting untuk menyuarakan fakta lapangan dan melaporkan yang selama ini ditutupi untuk mendorong akuntabilitas kebijakan.

Melalui kegiatan **International Webinar- Indonesia Journalist Reports, Transisi Energi: Deforestasi, Ekspor Illegal, Hak-Hak Masyarakat Adat, Praktik Culas, dan Gangguan Lingkungan**, kami ingin mengajak para jurnalis, masyarakat sipil, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mendalami dan mengkritisi paradoks transisi energi di Indonesia yang kian kompleks.

Tujuan

1. Melaporkan fakta-fakta lapangan dan temuan investigatif dari para jurnalis yang telah meliput secara langsung proyek bioenergi yang telah diimplementasikan di 8 provinsi di Indonesia. Termasuk dari praktik Hutan Tanaman Energi, Pembangkit Biomassa, *Co-firing*, dan Industri Biomassa.
2. Menghimpun pandangan global mengenai praktik proyek bioenergi di Indonesia dalam rangka merumuskan rekomendasi transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Memperkuat narasi gerakan masyarakat sipil di Indonesia agar keluar dari cengkaman kolonialisme iklim yang mengatasmakan transisi energi.

Output

1. Terlaporkannya kepada publik yang lebih luas terkait praktik bioenergi di Indonesia oleh jaringan jurnalis Transisi Energi Watch.
2. Terhimpunnya pandangan global yang tersusun dalam bentuk rekomendasi para pihak.
3. Terhubungnya jaringan masyarakat sipil Indonesia dengan global untuk menghentikan kolonialisme atas nama transisi energi guna mendorong kolaborasi lebih lanjut dalam investigasi, kampanye, dan advokasi isu lingkungan hidup dan transisi energi berkeadilan.

Tempat dan Waktu

Hari/ Tanggal : Selasa / 6 Mei 2025

Pukul : 11.00 - 15.00 WIB

Tempat : Zoom Meeting

Keynote speaker

Tri Mumpuni Wiyatno - Praktisi Energi Terbarukan, The World's 500 Most Influential Muslims 2021

Pelapor

Dalam Kegiatan webinar Internasional, *Indonesia Journalist Reports* yang berjudul **“International Webinar- Indonesia Journalist Reports, Transisi Energi: Deforestasi, Ekspor Illegal, Hak-Hak Masyarakat Adat, Praktik Culas, dan Gangguan Lingkungan”** akan menghadirkan Pelapor dan Penanggap Diskusi yaitu :

1. Gressi Plasmanto – Liputan 6 Jambi
Proyek Bioenergi di Jambi: “Transisi energi yang mengorbankan hutan alam dan Praktik ekspor ilegal di Jambi”
2. Sarjan Lahay – Mongabay Gorontalo
Indonesia sebagai Pemasok Energi Biomassa: “Menakar Komitmen Hijau di Tengah Permintaan Global, Ekspor Ilegal, Deforestasi, dan Gangguan Lingkungan”
3. M. Jaya Barends – Betahita Maluku Utara
Masyarakat Adat di Tengah Proyek Hutan Tanaman Energi Maluku: “Tanah Leluhur yang Tergusur”
4. Fitri Juliana - Digdata Aceh
Praktik Transisi Energi yang Menyakiti: “Gagalnya PT ANI dan Ancaman Kesehatan Akibat *Co-firing* di Aceh”
5. Hernanda Salsabilla – Nomorsatukaltim Kaltim
Melaporkan tentang Implementasi Proyek Bioenergi: "Menggali Dampak Transisi Energi terhadap Hutan dan Masyarakat"
6. Danur Lambang - Kompas Jawa Tengah
Melaporkan tentang Implementasi Proyek Bioenergi: "Tipu-tipu bisnis energi bersih di Pulau Jawa"
7. Khairiyah Fitri - Tempo Maluku
Melaporkan tentang Implementasi Proyek Bioenergi “Di Balik Janji Energi Terbarukan: Kegagalan Investasi Biomassa dan Lenyapnya Hak-Hak Masyarakat Adat di Pulau Buru”
8. Arief Nugroho - Pontianak Post Kalimantan Barat
Melaporkan Implementasi Proyek Bioenergi “Realita Biomassa: Menguak Kontradiksi Lingkungan di Balik Energi dari Kayu dalam Transisi Energi Indonesia”

Moderator : Ridzki Rinanto Sigit - Mongabay Indonesia

Penanggap Diskusi

No	Penanggap Diskusi	Tema
1	Souparna Lahiri Global Forest Watch dan Biomass Action Network	Deforestasi, Gangguan Lingkungan, dan Hilangnya Hak-Hak Masyarakat Adat
2	Junichi	Deforestasi, Ekspor Ilegal dan Praktik Culas Cofiring

	Friends of The Earth Japan	
3	Amalya Reza Oktaviani Trend Asia	Kolonialisme Iklim dan Transformasi Energi

Agenda

Waktu	Kegiatan	PIC
11.00 - 11.10	Open link zoom	Panitia
11.10 - 11.20	Pembukaan dan Setting The Context	Host- Anggi Prayoga
11.20 - 11.30	Keynote speaker Tri Mumpuni Wiyatno - Praktisi Energi Terbarukan	Moderator
11.30 - 13.20	Laporan dari Para Jurnalis 1. Gressi Plasmanto – Liputan 6 Jambi 2. Sarjan Lahay – Mongabay Gorontalo 3. M. Jaya Barends – Betahita Maluku Utara 4. Fitri Juliana - Digdata Aceh 5. Hernanda Salsabilla – Nomorsatukaltim Kaltim 6. Danur Lambang - Kompas (Jawa) 7. Khairiyah Fitri - Tempo Maluku 8. Arief Nugroho - Pontianak Post Kalimantan Barat	Moderator
13.20 – 13.50	Penanggap Diskusi	Moderator
13.50 – 14.20	Tanya Jawab dan Diskusi	Moderator
14.20 - 14.30	Kesimpulan	Moderator
14.30 - 15.00	Penutup	Moderator

Daftar Undangan

1. 350.org Indonesia
2. Advokasi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER)
3. Akademi Pergerakan IPB University (API)
4. AKSI!
5. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
6. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
7. Asosiasi Produsen Energi Biomassa Indonesia (APREBI)
8. Auriga Nusantara
9. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI)
10. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University (BEM FAHUTAN IPB)
11. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika (BEM-KM UBSI)

12. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan (BEM-KM IBI Kesatuan)
13. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Djuanda (BEM-KM UNIDA)
14. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor (BEM-KM UIKA)
15. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa IPB University (BEM-KM IPB)
16. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa London School of Public Relation (BEM-KM LSPR)
17. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta (BEM-KM PNJ)
18. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM-KM UI)
19. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Atma Jaya (BEM-KM Unika Atma Jaya)
20. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (BEM-KM UNJ)
21. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Nusa Bangsa (BEM-KM UNB)
22. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Pakuan Bogor (BEM-KM UNPAK)
23. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (BEM-KM UPNVJ)
24. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Tarumanegara (BEM-KM UNTAR)
25. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Trisakti
26. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Yarsi
27. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI)
28. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)
29. Belantara Foundation
30. Bersihkan Indonesia
31. Burung Indonesia
32. Center for Forestry Organizational Capacity and Institutional Studies (FORCI) IPB
33. Center for International Forestry Research (CIFOR) ICRAF
34. Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
35. Climate and Land Use Alliance (CLUA)
36. Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia
37. Corps Anak Prajurit
38. Development Dialogue Asia (DDA)
39. Eco Nusa
40. Energi Terbarukan Nusantara (ENTER NUSANTARA)
41. Energy Watch
42. Ford Foundation
43. Forest Watch Indonesia
44. Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM)
45. Garda Animalia
46. Generasi Energi Bersih
47. Green Justice Indonesia
48. Greenpeace Indonesia

49. HuMa Indonesia
50. Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund)
51. Indonesia Corruption Watch (ICW)
52. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
53. Indonesian Data Journalism Network (IDJN)
54. Indonesian Institute for Energy Economics (IIEE)
55. Indonesia Nature Film Society (INFIS)
56. Indonesian Parliamentary Center (IPC)
57. Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID)
58. Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF)
59. Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA)
60. Institute for Essential Services Reform (IESR)
61. Institute for Humanities and Development Studies (InHIDES)
62. Institute for Natural Resources, Energy, and Environmental Management (IREEM)
63. Institut Hijau Indonesia
64. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
65. Jajaran Wartawan Indonesia (JWI)
66. Jaringan Advokasi Tambang Nasional (JATAMNAS)
67. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
68. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)
69. Jejaring Lokal untuk Keberdayaan Masyarakat Sipil Indonesia (LOKADAYA)
70. Kaleka Indonesia
71. Kaoem Telapak
72. Katadata.co.id
73. Koaksi Indonesia
74. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
75. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
76. Komunitas Peduli Ciliwung
77. Konservasi Indonesia
78. Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK)
79. Kurawal Foundation
80. LAWALATA IPB
81. Lembaga Alam Tropika (LATIN)
82. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam)
83. Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL)
84. MADANI Berkelanjutan
85. Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI)
86. New Energy Nexus Indonesia
87. Non-Timber Forest Products - Exchange Programme (NTFP-EP) Indonesia
88. Non-Timber Forest Products - Exchange Programme (NTFP-EP) Asia
89. Noesa Madya
90. Pantau Gambut
91. Patera Foundation
92. Peduli Konservasi Alam (PEKA) Indonesia

93. PENABULU Oxfam
94. Pengurus Cabang Sylva Indonesia IPB University (PC SYLVA IPB)
95. Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN)
96. Plastic Smart Cities
97. Publish What You Pay Indonesia (PWYP)
98. Pusaka Bentala Rakyat
99. Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)
100. Rekam Nusantara Foundation
101. RMI - Indonesian Institute for Forest and Environment
102. Sajogyo Institute (SAINS)
103. Satya Bumi
104. Sawit Watch
105. Seknas FITRA
106. TELAPAK
107. The Asia Foundation (TAF)
108. The Samdhana Institute
109. The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ)
110. Traction Energy Asia
111. Transformasi untuk Keadilan (TuK)
112. Transisi Energi Berkeadilan
113. Transparency International Indonesia (TII)
114. Trend Asia
115. Universitas Pertahanan
116. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Eknas)
117. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat (WALHI JABAR)
118. Wetlands Internasional Indonesia
119. Wildlife Conservation Society (WCS)
120. Working Group ICCAs Indonesia (WGII)
121. World Resources Institute (WRI) Indonesia
122. World Wildlife Fund (WWF) Indonesia
123. Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (HIVOS)
124. Yayasan Indonesia CERAH (CERAH)
125. Yayasan International Animal Rescue Indonesia (YIARI)
126. Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
127. Yayasan Kiara
128. Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)
129. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
130. Yayasan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam (Rumah YAPEKA)
131. Yayasan PIKUL
132. Yayasan Puter Indonesia
133. Yayasan Rumah Energi
134. Yayasan SINTAS Indonesia
135. Jurnalis Media
136. Publik Umum

137. Organisasi Masyarakat Sipil

138. Komunitas